

**PERAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA DALAM PEMBINAAN
USAHA PANDAI BESI DI DESA TERATAK KECAMATAN RUMBIO JAYA
TAHUN 2024**

Oleh : Haden El Pasta
Dosen Pembimbing : Drs. Ishak, M.Si
Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya peran dinas perindustrian dan tenaga kerja dalam pembinaan usaha pandai besi serta faktor penghambat dalam pembinaan usaha pandai besi di Desa Teratak tahun 2024. Penelitian ini menggunakan teori Peran pemerintah oleh Gede Diva (2019) yang menyatakan terdapat peran pemerintah yang efektif dan optimal dalam pengembangan IKM diwujudkan sebagai fasilitator, regulator dan katalisator. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan pelaksanaan peran pemerintah sebagai fasilitator oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar masih belum mencapai tingkat yang maksimal, sehingga diperlukan pembenahan untuk meningkatkan efektivitasnya. Sementara itu, fungsi pemerintah sebagai regulator, sudah berjalan dan diimplementasikan, namun penting untuk terus memperhatikan aspek regulasi agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Di sisi lain, peran pemerintah sebagai katalisator dinilai sudah cukup efektif, terlihat dari berbagai langkah yang telah diambil untuk mendorong kemajuan IKM, baik dari segi pengembangan sumber daya manusia maupun peningkatan kualitas IKM itu sendiri.

Kata Kunci: *Peran Pemerintah Daerah, Pembinaan Usaha Pandai Besi*

ABSTRACT

This study aims to determine the role of the industrial and labor services in developing blacksmith businesses and the inhibiting factors in developing blacksmith businesses in Teratak Village in 2024. This study uses the theory of the role of government by Gede Diva (2019) which states that there is an effective and optimal role of government in the development of SMEs realized as a facilitator, regulator and catalyst. This study uses qualitative methods. Data collection techniques include interviews and documentation.

The results of this study indicate that the implementation of the government's role as a facilitator by the Kampar Regency Industry and Manpower Office has not yet reached its maximum level, so improvements are needed to increase its effectiveness. Meanwhile, the government's function as a regulator is already running and being implemented, but it is important to continue to pay attention to regulatory aspects to remain relevant to current developments. On the other hand, the government's role as a catalyst is considered quite effective, as evidenced by the various steps that have been taken to encourage the progress of SMEs, both in terms of human resource development and improving the quality of SMEs themselves.

Keywords: *The Role of Regional Government in Developing Blacksmith Businesses*

PENDAHULUAN

Pemerintah memiliki peran vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, salah satunya melalui pengembangan sektor industri kecil dan menengah (IKM). Sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk mendorong kreativitas dan inovasi pelaku usaha lokal. Di Kabupaten Kampar, pengelolaan dan pembinaan IKM menjadi tanggung jawab Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang secara aktif merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan program pengembangan, dan melakukan evaluasi terhadap kemajuan sektor industri setempat.

Salah satu sentra utama IKM di Kabupaten Kampar terdapat di Kecamatan Rumbio Jaya, tepatnya di Desa Teratak. Wilayah ini menonjol sebagai pusat usaha pandai besi dengan jumlah pelaku yang paling banyak dibandingkan desa lainnya. Pengembangan usaha ini telah mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah, terbukti melalui kegiatan pelatihan teknis, pemberian bantuan peralatan produksi, serta pembentukan kawasan sentra produksi. Berbagai pelatihan diberikan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas pengrajin, agar mampu memenuhi standar nasional serta menghasilkan produk yang bernilai saing tinggi, seperti alat-alat pertanian berlabel SNI.

Namun, berbagai kendala masih dihadapi dalam pengelolaan usaha pandai besi di Desa Teratak. Mayoritas pengrajin masih menjalankan produksi dengan metode tradisional dan peralatan manual, sehingga produktivitas serta efisiensi kerja belum optimal. Permasalahan lain yang turut menghambat perkembangan usaha adalah keterbatasan modal, akses bahan baku, serta pemasaran yang masih terbatas pada pasar lokal. Hanya sebagian kecil pengrajin yang secara penuh memanfaatkan program

pembinaan dari pemerintah, sementara pelatihan manajerial maupun teknis masih perlu diperluas cakupannya agar seluruh pelaku dapat merasakan manfaat secara merata.

Dalam rangka mengatasi tantangan tersebut, dukungan pemerintah daerah sangat diperlukan, utamanya melalui program pembinaan yang berkelanjutan, bantuan permodalan, serta fasilitasi pemasaran yang lebih terintegrasi. Kerja sama lintas sektor, baik dengan koperasi maupun pihak swasta, juga menjadi strategi penting guna memperkuat jaringan distribusi dan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas. Upaya optimalisasi peran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar menjadi kunci dalam mewujudkan usaha pandai besi di Desa Teratak sebagai sektor unggulan yang mampu berkontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah.

Berdasarkan dengan pemaparan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan judul **“Peran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Dalam Pembinaan Usaha Pandai Besi di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Tahun 2024”**.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka perlu dirumuskan permasalahannya agar dapat memperjelas tujuan dari penelitian. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja dalam pembinaan usaha pandai besi di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya tahun 2024?
2. Apa saja faktor yang menghambat Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja dalam pembinaan usaha pandai besi di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya tahun 2024?

TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan dalam penelitian ini, maka penulis bertujuan untuk:

1. Untuk mendeskripsikan peran dinas perindustrian dan tenaga kerja dalam pembinaan usaha pandai besi di Desa Teratak tahun 2024.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja dalam dalam pembinaan usaha pandai besi di Desa Teratak tahun 2024.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam fenomena yang terjadi pada dinas perindustrian dan tenaga kerja dalam pembinaan usaha pandai besi di desa teratak kecamatan rumbio jaya tahun 2024. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengkaji realitas sosial secara alami serta memahami konteks fenomena secara utuh dan detail. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur dan dokumentasi, dengan sumber data primer berupa informasi langsung dari narasumber yang kompeten, dan data sekunder dari dokumen serta literatur terkait. Lokasi penelitian penulis lakukan di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar, sebagai institusi yang menjadi fokus kajian. Teknik analisis data dilakukan melalui empat tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi, sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Melalui proses ini, penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan hubungan antara variabel independen dan dependen secara mendalam, serta memberikan pemahaman kontekstual mengenai upaya inklusivitas politik bagi kelompok disabilitas dalam pelaksanaan pemilu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam Pembinaan Usaha Pandai Besi di Desa Teratak Tahun 2024

1.1 Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator

Pada tahun 2024, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar mengimplementasikan berbagai program pembinaan untuk meningkatkan kapasitas usaha kerajinan pandai besi di Desa Teratak. Bentuk dukungan yang diberikan meliputi pendataan usaha, pelaksanaan pelatihan teknis dan manajerial, serta kegiatan promosi produk. Kegiatan pembinaan ini dirancang sebagai upaya nyata dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia serta hasil produksi industri kecil dan menengah di wilayah tersebut.

Data yang diperoleh menunjukkan bahwa dari total 43 unit IKM non-formal di Kecamatan Rumbio Jaya, sebanyak 35 usaha merupakan pengrajin pandai besi. Hal ini menjadi dasar bagi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk lebih memfokuskan pelatihan dan pengembangan kompetensi kepada pelaku usaha di sektor ini. Materi pembinaan difokuskan pada peningkatan keterampilan teknis produksi, pemenuhan standar mutu, hingga strategi pemasaran produk.

Meskipun pelatihan telah dilaksanakan secara rutin, efektivitasnya masih belum optimal. Beberapa kendala yang diidentifikasi antara lain keterbatasan durasi pembinaan, cakupan materi yang masih bersifat umum, serta pelatihan yang belum sepenuhnya menyesuaikan dengan kebutuhan peserta. Selain itu, bimbingan dan pengawasan yang dilakukan sering kali belum menjangkau seluruh pelaku usaha secara merata akibat keterbatasan sumber daya aparatur.

Dalam upaya meningkatkan daya saing IKM pandai besi, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja berperan memberi pengarahan

mengenai pengelolaan usaha, memperkenalkan metode produksi yang efisien, serta membimbing praktik pemasaran meski masih terbatas pada pasar lokal. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak dinas terkait, ditemukan bahwa bimbingan dan pengarahan yang diberikan telah membantu peningkatan pengetahuan pengrajin, namun dampak terhadap perkembangan usaha secara menyeluruh masih belum signifikan.

Program pelatihan, yang terdiri dari pendidikan keterampilan secara tertulis dan praktik, menunjukkan bahwa sebagian besar peserta merasa materi yang diajarkan masih sesuai dengan kemampuan awal mereka, sehingga peningkatan kompetensi yang diharapkan belum sepenuhnya tercapai. Faktor lain yang juga menjadi hambatan adalah keterbatasan waktu pelaksanaan pelatihan dan minimnya personel pendamping dari dinas terkait, sehingga pelaksanaan pengawasan terhadap proses usaha dan hasil produksinya belum dapat berjalan optimal.

Secara keseluruhan, pelaksanaan pembinaan industri kecil dan menengah di sektor pandai besi oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar sudah berjalan, namun tingkat efektivitasnya masih dalam kategori cukup dan memerlukan peningkatan baik dari segi jangkauan, kualitas materi, maupun metode pelaksanaannya. Perlu adanya langkah-langkah strategis lanjutan agar pembinaan mampu memberikan dampak nyata terhadap pengembangan usaha dan kesejahteraan pelaku industri kecil di Desa Teratak.

1.2 Peran Pemerintah Sebagai Regulator

Pada tahun 2024, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar menjalankan fungsi regulasi melalui penyusunan kebijakan dan program pembinaan yang mencakup pelatihan, pendampingan, serta pemberian alat produksi seperti blower, mesin diesel,

gerinda, dan air hammer kepada para pengrajin pandai besi. Tujuan kebijakan ini adalah meningkatkan mutu produk sekaligus kemampuan teknologi para pengrajin. Namun, pelaksanaan regulasi tersebut menemui sejumlah kendala, termasuk kurang optimalnya sosialisasi kebijakan kepada pengrajin, keterbatasan bantuan dari pemerintah, dan minimnya kemitraan dengan sektor swasta dalam aspek pemasaran produk. Kondisi ini menyebabkan tidak semua pengrajin dapat memanfaatkan program secara maksimal, sehingga potensi produksi dan kualitas usaha pandai besi belum sepenuhnya tereksplorasi.

Sebagai pengatur, pemerintah memegang peran strategis dalam merancang kebijakan dan regulasi yang mendukung operasional Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), termasuk usaha pandai besi. Peran ini penting untuk menciptakan iklim bisnis yang kondusif, memberikan kepastian hukum, serta menyediakan perlindungan dan dukungan agar usaha tersebut dapat terus bertumbuh dan berkelanjutan. Melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja serta Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Kampar, pemerintah mengelola serta mengawasi pelaksanaan pembinaan usaha pandai besi agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dasar hukum pengelolaan usaha kecil di Kampar antara lain Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2024 yang mengatur definisi, hak, kewajiban, dan mekanisme pembinaan usaha mikro dan kecil, termasuk usaha pandai besi. Sementara itu, Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2021 mengatur tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM yang fokus pada pengembangan dan pembinaan UMKM di daerah tersebut. Regulasi ini menjadi landasan agar pemerintah dapat mengatur sekaligus memberi perlindungan dan pembinaan yang terintegrasi bagi para pelaku usaha.

Salah satu capaian utama dari kebijakan ini adalah keberhasilan Koperasi Rumbio Jaya Steel di Desa Teratak yang memperoleh sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dari Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk produk alat pertanian seperti dodos dan egrek pada tahun 2021. Sertifikasi ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah daerah, melalui dinas terkait, dan BSN yang memberikan pelatihan teknis agar produk pengrajin memenuhi standar SNI 8205:2016 untuk dodos dan SNI 4874:2019 untuk egrek.

Selain pembinaan teknis, pemerintah secara rutin melaksanakan program pelatihan manajemen usaha dan pemasaran digital. Salah satu inisiatif yaitu pelatihan strategi promosi yang diadakan oleh civitas akademika Universitas Riau di Desa Teratak, yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan pengrajin dalam memasarkan produk secara efektif melalui platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan YouTube. Pemerintah juga mendukung pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan pengelolaan Sistem Informasi Koperasi Industri Mikro (SIKIM) Rumbio Jaya Steel, yang berfungsi mempermudah pengurusan perizinan, bantuan alat produksi, serta pengembangan usaha secara sistematis.

Pengawasan kualitas produk dilakukan secara berkala agar mutu tetap terjaga, serta disertai fasilitasi pertemuan bisnis antara pelaku IKM pandai besi dan perusahaan perkebunan kelapa sawit sebagai strategi memperluas jaringan pemasaran produk lokal. Selain itu, pemerintah daerah memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap pengrajin yang berhasil meningkatkan mutu dan produktivitas usaha mereka. Koperasi Rumbio Jaya Steel telah mendapat apresiasi sebagai pusat industri yang produktif dan berperan dalam pengembangan alat mesin pertanian di Kabupaten Kampar, hal ini sekaligus

menjadi bukti keberhasilan strategi regulasi pemerintah dalam mendukung kemajuan usaha kecil dan menengah.

Secara keseluruhan, peran pemerintah sebagai regulator di Kabupaten Kampar tidak hanya bersifat mengatur, melainkan juga memberikan dukungan nyata yang mencakup pembinaan, pendampingan, pengawasan, dan pemberdayaan pengrajin pandai besi. Hal tersebut diharapkan menjadi fondasi kuat bagi pengembangan kualitas dan daya saing produk lokal, sehingga dapat bersaing secara nasional maupun internasional.

1.3 Peran Pemerintah Sebagai Katalisator

Menurut Gede Diva (2019), pemerintah berperan sebagai katalisator dalam pengembangan usaha dengan memberikan dorongan, mempercepat proses, serta menghubungkan berbagai potensi yang ada sehingga akselerasi pertumbuhan usaha dapat tercapai. Fungsi pemerintah tidak sebatas sebagai fasilitator dan pengatur, tetapi juga sebagai motor penggerak yang menginisiasi kolaborasi, mendorong inovasi, serta membuka akses yang lebih luas terhadap sumber daya. Peran ini menjadikan pemerintah sebagai agen perubahan yang mempercepat akses pelaku usaha terhadap sumber daya, jaringan, teknologi, dan peluang pasar sehingga mereka mampu berkembang lebih cepat dan responsif terhadap perubahan zaman.

Dalam pelaksanaan peran katalisator ini, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar aktif menjalin kemitraan antara kelompok usaha pandai besi di Desa Teratak dengan berbagai pihak, termasuk BUMN, pemerintah pusat, dan perguruan tinggi. Sebagai contoh nyata, pada tahun 2020, KUB Pandai Besi Teratak menerima dana bantuan senilai Rp600 juta dari Program Kemitraan PTPN V yang dimanfaatkan untuk modal usaha, pengadaan peralatan produksi, dan pengembangan usaha. Kolaborasi tersebut tidak hanya

memperluas jangkauan pasar, namun juga meningkatkan daya saing produk lokal. Produk pandai besi dari Desa Teratak kini menjadi pemasok utama alat pertanian untuk perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau dan bahkan telah menembus pasar luar provinsi.

Selain itu, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja berperan sebagai katalisator pengenalan teknologi baru dan inovasi dalam proses produksi melalui pelatihan penggunaan alat-alat industri seperti blower, mesin diesel, gerinda, dan air hammer guna meningkatkan efisiensi dan mutu hasil produksi. Data periode 2018-2019 mencatat empat program pembinaan utama meliputi pelatihan teknologi dan penyediaan bantuan alat, yang meskipun pencapaiannya sekitar 60-67%, telah mempercepat adopsi teknologi di kalangan pengrajin pandai besi.

Sebagai katalisator, dinas ini juga membantu kelompok usaha mendapatkan sertifikasi kualitas. Produk dodos dan egrek dari Rumbio Jaya Steel (RJS) di Desa Teratak memperoleh sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) dari Badan Standardisasi Nasional, menjadikannya UKM pertama di Indonesia yang meraih sertifikasi ini untuk kategori alat pertanian. Dalam mempercepat transformasi digital, Dinas bekerja sama dengan perguruan tinggi; pada 2023, dosen dan mahasiswa Universitas Riau melaksanakan pelatihan digital marketing bagi kelompok pandai besi Desa Teratak, bertujuan memperluas jaringan penjualan, memperkenalkan produk ke pasar digital, serta meningkatkan pendapatan pengrajin lokal. Akibatnya, pemasaran melalui media sosial dan platform online meningkat sehingga jangkauan konsumen lebih luas dan membuka peluang pasar baru di tingkat nasional.

Lebih lanjut, Dinas menyediakan pelatihan manajemen usaha, pengelolaan keuangan, dan pengembangan kelompok

usaha bersama (KUB) untuk menguatkan kemandirian dan profesionalisme pelaku usaha. Program pelatihan dan pembinaan ini telah menyentuh puluhan pengrajin di berbagai desa, meskipun upaya perlu terus ditingkatkan untuk pemerataan dan optimalisasi distribusi. Saat ini, usaha pandai besi telah menjadi sumber penghidupan utama bagi ratusan penduduk Desa Teratak, memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal.

Data realisasi program menunjukkan persentase peserta yang mengikuti pembinaan teknologi, pelatihan pengolahan bahan baku besi, dan peningkatan pengetahuan berkisar 60% dengan bantuan alat mencapai 67%. Peran katalisator dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja ini terbukti mempercepat pertumbuhan usaha pandai besi melalui kolaborasi strategis, inovasi teknologi, sertifikasi mutu, dan transformasi digital. Meskipun masih ada tantangan dalam pemerataan pelatihan dan akses modal, dampak positifnya telah dirasakan secara nyata oleh masyarakat setempat.

Secara khusus, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar berperan aktif dalam mendorong kemitraan strategis, mempercepat teknologi dan inovasi, memfasilitasi sertifikasi kualitas, mengakselerasi digitalisasi pemasaran, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kemandirian ekonomi. Peran tersebut mempercepat perkembangan serta daya saing usaha pandai besi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengukuhkan Desa Teratak sebagai pusat industri besi yang berpengaruh di Riau dan bahkan tingkat nasional.

2. Hambatan Pembinaan Usaha Pandai Besi Di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Tahun 2024

Pada tahun 2024, pengembangan usaha pandai besi di Desa Teratak, Kecamatan Rumbio Jaya menghadapi sejumlah kendala

utama, di antaranya kurang efektifnya pengarahan, keterbatasan waktu pelaksanaan bimbingan, serta minimnya pengawasan. Untuk mengatasi permasalahan ini, dibutuhkan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, penerapan metode pembinaan yang lebih praktis, serta alokasi anggaran yang memadai guna mendukung pengawasan secara optimal. Dengan langkah tersebut, diharapkan usaha pandai besi dapat tumbuh secara maksimal dan berdaya saing tinggi.

Pengarahan yang diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar dinilai kurang mampu meningkatkan pemahaman pengrajin terkait pengelolaan usaha secara menyeluruh. Materi pengarahan cenderung terbatas pada pengenalan alat dan aspek pemasaran dasar, tanpa mencakup teknik produksi detail seperti pengukiran atau efisiensi pengerjaan produk besi. Kondisi ini mengurangi efektivitas pembinaan dalam mengasah keterampilan teknis pengrajin.

Selain itu, keterbatasan waktu pelatihan juga berdampak signifikan, di mana jadwal bimbingan yang direncanakan selama lima hari hanya terealisasi efektif selama tiga hari. Hal ini disebabkan oleh manajemen waktu yang kurang optimal dan jeda istirahat yang panjang. Kondisi ini berpotensi menurunkan efektivitas transfer pengetahuan dan keterampilan, apalagi metode pelatihan yang digunakan mayoritas berupa ceramah dan diskusi tanpa praktik langsung yang terbatas, padahal metode pembelajaran praktis telah terbukti lebih efektif untuk meningkatkan kemampuan teknis para pengrajin.

Pengawasan terhadap kegiatan pembinaan juga belum optimal. Dengan hanya empat staf pengawas yang bertanggung jawab atas puluhan unit usaha di berbagai lokasi, pengawasan lebih bersifat administratif dan minim evaluasi teknis. Keterbatasan anggaran operasional juga

membatasi frekuensi kunjungan lapangan, sehingga kendala produksi dan pemasaran yang dihadapi pelaku usaha kerap tidak terdeteksi secara cepat.

Profil pendidikan pengrajin yang mayoritas hanya sampai tingkat SMP menunjukkan kebutuhan akan pengarahan yang aplikatif dan praktis, bukan sekadar teori. Materi yang tidak komprehensif dan terbatas dalam teknik produksi menghambat kemampuan pengrajin untuk bersaing di pasar yang kian kompetitif.

Dari perspektif Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, fokus pembinaan diarahkan pada penguatan teknologi, pelatihan, bantuan alat, dan promosi produk untuk meningkatkan kualitas dan daya saing. Namun, dari sisi pelaku usaha, kebutuhan utama adalah akses pelatihan yang relevan, modal usaha yang cukup, pemasaran efektif, dan pengembangan jaringan bisnis. Kesenjangan antara kebutuhan riil dan program pembinaan yang tersedia menjadi kendala utama, disertai realisasi program yang baru mencapai 60-67% dari target dan pelatihan yang hanya menjangkau sebagian kecil pengrajin.

Pengrajin menghadapi kesulitan dalam memanfaatkan teknologi modern, kekurangan modal, keterbatasan alat produksi, serta pasar yang masih terbatas karena minimnya promosi dan kerjasama dengan pihak swasta. Mereka juga cenderung mengandalkan strategi pemasaran tradisional yang kurang efektif dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Untuk peningkatan ke depan, Dinas merekomendasikan penguatan sosialisasi, perluasan promosi produk, pengembangan teknologi yang sesuai kebutuhan, serta peningkatan kapasitas SDM di semua level. Sementara pelaku usaha menekankan perlunya pelatihan praktek, bantuan alat, dan akses pasar lebih luas melalui jaringan kemitraan yang solid. Pendekatan yang lebih responsif terhadap kondisi nyata di lapangan

diharapkan dapat mempercepat kemajuan usaha pandai besi di Desa Teratak.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam pembinaan usaha pandai besi di Desa Teratak, Kecamatan Rumbio Jaya pada tahun 2024 belum berjalan secara optimal. Pembinaan yang diberikan meliputi pelatihan berupa materi tertulis dan praktik lapangan mengenai pengelolaan usaha serta pemasaran, namun implementasinya belum mampu memaksimalkan potensi yang ada. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu untuk pengembangan pengetahuan serta minimnya pengawasan terhadap hasil usaha yang mengikuti program pembinaan, sehingga kegiatan tersebut cenderung bersifat formalitas saja.

Beberapa kendala utama dalam pelaksanaan pembinaan tersebut antara lain: (a) pelatihan belum menunjukkan hasil maksimal karena waktu yang terbatas dan kurangnya monitoring rutin terhadap peningkatan keterampilan pengrajin, serta belum adanya program pembinaan yang komprehensif khususnya dalam pengembangan pemasaran usaha pandai besi; (b) keterbatasan jumlah dan kemampuan petugas pembinaan dan pengawasan di lapangan menyebabkan evaluasi terhadap kendala yang dihadapi pengrajin tidak dilakukan secara menyeluruh, sehingga permasalahan dalam manajemen usaha belum teridentifikasi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Arifin Tahir, M., Rusli Isa, M., & Nani, Y. N. (2024). BUKU AJAR KAPITA SELEKTA MANAJEMEN PEMERINTAH DAERAH. CV. CAHAYA ARSH PUBLISHER & PRINTING.

- Diva, G. (2019). Mengembangkan UKM Melalui Pembinaan Peran Pemerintah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Ugm Press.
- Rahayu, A. S. (2022). *Pengantar Pemerintahan Daerah: kajian teori, hukum dan aplikasinya*. Sinar Grafika.
- Kartika, C. F., Hanafi, I., & Hermawan, S. (2012). *Good Environmental Governance*. Universitas Brawijaya Press.
- Nain, U. (2017). *Relasi pemerintah desa dan supradesa dalam perencanaan dan penganggaran desa*. Pustaka Pelajar.
- Nurhayati, C. (Ed.). (2018). *BUMDes dan kesejahteraan masyarakat desa*. Pusat Penelitian, Badan Keahlian, DPR RI, Bidang Kesejahteraan Sosial.
- Robert K. Merton, *Social Theory and Social Structure*, 1968, Free Press, hlm. 156.
- Rahman, F. (2018). *Teori Pemerintahan*. Universitas Brawijaya Press.
- Rhenald Kasali, *Revolusi Mental*, 2015, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 45.
- Sugiman, S. (2018). Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum*, 7(1), 82-95.
- Salam, M. D., & Prathama, A. (2022). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan IKM. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(2), 137-143.
- Siregar, R. T. (2020). Manajemen Pemerintahan.
- Siti Marwiyah, S. H., Sedarmayanti, M. P., Fedianty Augustinah, M. M., Teni Listiani, M. M., Jubaedah, E., & Kushendar, D. H. (2024). *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) Di Era Digital*. Deepublish.
- Zein, H. H. M., & Septiani, S. (2024). *Digitalisasi Pemerintahan Daerah: Katalis Untuk Integrasi dan Optimasi Good Governance*. Sada Kurnia Pustaka.

Dokumen :

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
Tentang Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (IKM)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Daerah (PERDA)
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Kampar.